



Jejak Peninggalan dan Pengaruh Buddha Tantrayana pada Kerajaan Pagaruyung Masa Adityawarman di Minangkabau

Traces of the Legacy and Influence of Tantrayana Buddhism on the Pagaruyung Kingdom during the Adityawarman Era in Minangkabau

Aisiah¹, Ari Muhaimin², Annisa Ade Maharani³, Pasya Azzura⁴

Universitas Negeri Padang

Email: arimuhaimin1310@gmail.com², annisaademaharani@gmail.com³, psyaaazzura@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received : 26-06-2026

Revised : 28-06-2026

Accepted : 30-06-2026

Published : 02-07-2026

Abstract

The reign of King Adityawarman in Minangkabau in the 14th century left a unique religious phenomenon through the dominance of the Bhairawa sect of Tantrayana Buddhism. This research aims to identify traces of archaeological remains in the form of inscriptions and statues, as well as analyzing the extent to which the influence of Tantrayana teachings played a role in political legitimacy and royal defense. The research method used is a historical research method which includes four main stages, namely heuristics (source collection), source criticism, interpretation, and historiography. The research results show that Adityawarman is a fanatical follower of Tantrayana and has made it an instrument for protecting the region from external threats and the spread of new religions. Traces of real remains were found in the 4.41 meter high demonic Bhairawa Statue as well as a number of inscriptions such as Pagaruyung I and Saruaso I which record the ritual of the king's ordination as Ksetrajna with the title Wisesa Dharani. This finding confirms that the influence of Tantrayana Buddhism is not just a religious practice, but rather a strategy to strengthen power through aligning the king with a supernatural entity in order to maintain sovereignty in the interior of Minangkabau.

Keywords: *Adityawarman, Tantrayana Buddha, Minangkabau*

Abstrak

Masa pemerintahan Raja Adityawarman di Minangkabau pada abad ke-14 menyisakan fenomena keagamaan yang unik melalui dominasi ajaran Buddha Tantrayana sekte Bhairawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jejak peninggalan arkeologis berupa prasasti dan arca, serta menganalisis sejauh mana pengaruh ajaran Tantrayana tersebut berperan dalam legitimasi politik dan pertahanan kerajaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan utama, yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adityawarman merupakan penganut Tantrayana yang fanatik dan menjadikannya instrumen perlindungan wilayah dari ancaman luar serta penyebaran agama baru. Jejak peninggalan nyata ditemukan pada Arca Bhairawa setinggi 4,41 meter yang bersifat demonis serta sejumlah prasasti seperti Pagaruyung I dan Saruaso I yang mencatat ritual pentahbisan raja sebagai *Ksetrajna* bergelar *Wisesa Dharani*. Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh Buddha Tantrayana bukan sekadar praktik religi, melainkan strategi pengukuhan kekuasaan melalui penyeteraan diri raja dengan entitas adikodrati guna menjaga kedaulatan di pedalaman Minangkabau.

Kata Kunci: *Adityawarman, Buddha Tantrayana, Minangkabau*



PENDAHULUAN

Masa pemerintahan Adityawarman pada abad ke-14 menjadi salah satu periode penting dalam sejarah Minangkabau. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Malayu mengalami perkembangan politik yang cukup besar. Beliau memerintah selama kurang lebih 27 tahun, yakni antara tahun 1347 hingga 1374 Masehi, setelah sebelumnya menjabat posisi penting di Kerajaan Majapahit (Pratiwi et al., 2024). Tokoh Adityawarman banyak dikaji dalam penelitian sejarah karena perannya dalam perkembangan politik di Sumatra. Meskipun memiliki hubungan darah dengan bangsawan Majapahit, prasasti-prasasti yang dikeluarkannya tidak menunjukkan adanya ketundukan kepada penguasa di Jawa (Kusumadewi, 2012).

Adityawarman meninggalkan sejumlah prasasti yang menjadi sumber penting sejarah Minangkabau. Tercatat ada sekitar 18 buah prasasti berbahan batu andesit dan batu pasir yang telah ditemukan dan diidentifikasi oleh para ahli. Prasasti-prasasti ini menjadi bukti otentik yang menyiratkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, hingga birokrasi pemerintahan pada masa lampau. Keberadaan prasasti tersebut tersebar di berbagai lokasi strategis di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Dharmasraya, dan Pasaman. Penemuan prasasti membantu memberikan data tertulis mengenai sejarah Minangkabau pada masa tersebut (Africon et al., 2024).

Salah satu aspek penting pada masa Adityawarman adalah kuatnya pengaruh ajaran Buddha Tantrayana. Praktik Tantrayana pada masa Adityawarman menunjukkan penggunaan simbol-simbol religius yang berbeda dari Buddhisme pada umumnya (Siregar, 2016). Hal ini terlihat jelas pada peninggalan Arca Bhairawa setinggi 4,41 meter yang digambarkan berdiri di atas tumpukan mayat. Ajaran Tantrayana tampaknya digunakan untuk memperkuat legitimasi spiritual kekuasaan raja. Praktik religi ini bahkan melibatkan upacara penyucian berdarah yang bertujuan mengukuhkan posisi raja sebagai pelindung agama (Utomo & Sudarman, 2018).

Kondisi geopolitik pada abad ke-14 juga memaksa Adityawarman untuk mengambil langkah-langkah pertahanan yang bersifat strategis dan taktis. Beliau memindahkan ibu kota kerajaan dari wilayah pesisir Dharmasraya ke daerah pedalaman Saruaso di Ranah Minangkabau. Pemindahan ini dilakukan untuk memperkuat kedaulatan dan menjauhkan pusat kekuasaan dari potensi ancaman luar seperti ekspansi Majapahit maupun pengaruh Islam. Selain itu, wilayah pedalaman dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama tambang emas. Adityawarman bahkan menyandang gelar *Kanakamedinindra* yang berarti penguasa di tanah emas sebagai simbol kemakmuran kerajaannya (Kusumadewi, 2012).

Penelitian mengenai jejak sejarah Adityawarman telah banyak dilakukan oleh para pakar dari sisi epigrafi dan arkeologi murni. Kusumadewi (2012) dalam tesisnya melakukan kajian epigrafi mendalam terhadap 13 prasasti yang dikeluarkan selama masa kekuasaan Adityawarman. Penelitian tersebut fokus pada perkembangan bentuk aksara, jenis bahasa, serta tata bahasa yang digunakan dalam tiap inskripsi. Hasilnya menunjukkan bahwa tulisan Sumatra pada masa itu telah memiliki gaya khusus yang berbeda dengan tulisan di Jawa. Namun, kajian ini masih terbatas pada aspek fisik dan linguistik tanpa menganalisis secara mendalam strategi pertahanan politiknya.

Di sisi lain, penelitian arkeologis yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan telah memberikan gambaran mengenai persebaran situs kepurbakalaan di Sumatra Barat. Laporan survei arkeologi di Kabupaten Agam dan Pasaman (2007) mengidentifikasi berbagai tinggalan bangunan



suci yang berlatar belakang Hindu-Buddha. Temuan berupa fragmen makara dan dwarapala di wilayah Rao menunjukkan adanya interaksi budaya yang kuat dengan pusat kekuasaan Adityawarman. Penelitian ini menekankan pada upaya inventarisasi dan pelestarian benda cagar budaya agar tidak punah dimakan usia. Meski demikian, hubungan antara temuan arkeologis tersebut dengan ritual spesifik Tantrayana belum dibahas secara komprehensif.

Analisis mengenai legitimasi kekuasaan melalui media prasasti juga telah dikaji oleh beberapa peneliti kontemporer. Pratiwi et al. (2024) menemukan bahwa terdapat dua bentuk legitimasi utama yang dilakukan oleh Adityawarman, yakni penyetaraan diri dengan dewa dan penggunaan nama pengangkatan raja atau *nāmābhiseka*. Raja menyamakan dirinya dengan entitas adikodrati seperti Dewa Indra, Adibuddha, dan Avalokitesvara untuk membangun citra penguasa yang sempurna. Selain itu, ornamen kepala kala pada prasasti juga dimaknai sebagai simbol perlindungan sekaligus ancaman bagi musuh-musuh kerajaan. Kajian ini sangat membantu dalam memahami sisi politik, namun masih perlu dipertajam dengan analisis fungsional ajaran Bhairawa sebagai instrumen pertahanan wilayah.

Aspek religius Tantrayana dalam sejarah Nusantara juga menjadi perhatian khusus dalam tulisan Mukaffa (2017). Beliau menguraikan bahwa sekte Tantra-Bhairawa telah berkembang di Sumatra sejak abad ke-7 dan mencapai puncaknya pada masa Adityawarman. Ritual yang dilakukan para penganutnya sering dianggap menyimpang karena melibatkan unsur kekerasan dan pemujaan di atas lapangan mayat atau *ksetra*. J.L. Moens memberikan petunjuk penting bahwa Adityawarman ditahbiskan sebagai *Wisesadharani* dalam upacara yang sangat mengerikan. Penjelasan ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami latar belakang spiritual sang raja. Akan tetapi, kajian ini lebih berfokus pada dimensi teosofis dan transisi ke masa Islam.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan mengingat informasi mengenai prasasti dan peninggalan Adityawarman masih tersebar di berbagai sumber akademik yang sulit diakses oleh masyarakat luas. Terdapat kesenjangan pemahaman mengenai alasan di balik sifat demonis arca dan prasasti yang cenderung dianggap menyeramkan tanpa dipahami fungsi strategisnya. Tanpa adanya analisis yang mendalam, nilai-nilai sejarah dan spiritual yang terkandung dalam warisan budaya ini akan pudar seiring waktu (Rahmawati et al., 2024). Selain itu, kondisi fisik beberapa prasasti saat ini sangat memprihatinkan karena mengalami keausan alami maupun akibat aktivitas pembangunan irigasi. Oleh karena itu, pengumpulan data dan interpretasi ulang atas tinggalan ini sangat diperlukan sebagai bahan acuan untuk mengungkapkan jati diri bangsa dan kerangka sejarah kebudayaan Indonesia (Oetomo et al., 2007).

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara temuan arkeologis Arca Bhairawa setinggi 4,41 meter dengan rekaman ritual pentahbisan raja dalam prasasti-prasasti spesifik seperti Saruaso I dan Pagaruyung I. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan antara kajian epigrafi fisik dan kajian sejarah politik, penelitian ini mencoba melihat ajaran Tantrayana sebagai sebuah strategi pertahanan terpadu. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana simbol-simbol demonis digunakan sebagai alat penggentar atau *dharmapala* untuk menghadapi ancaman nyata dari arah timur. Penelitian ini juga menerapkan metode sejarah yang sistematis mulai dari heuristik hingga historiografi untuk merekonstruksi fanatisme keagamaan Adityawarman sebagai instrumen legitimasi di pedalaman Minangkabau.



Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara detail jejak peninggalan arkeologis berupa prasasti dan arca yang berasal dari masa pemerintahan Raja Adityawarman di Minangkabau. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana pengaruh ajaran Buddha Tantrayana sekte Bhairawa berperan dalam sistem legitimasi politik dan strategi pertahanan kerajaan. Melalui pengkajian isi prasasti, diharapkan dapat terungkap makna di balik penyetaraan diri raja dengan entitas adikodrati guna menjaga kedaulatan wilayah. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan mengenai sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara dan kontribusinya terhadap peradaban lokal. Akhirnya, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan metode sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah heuristik yang difokuskan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian arkeologis terdahulu. Peneliti tidak melakukan pengumpulan sumber fisik secara langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan hasil pembacaan prasasti dan dokumentasi visual arca dari referensi yang telah dipublikasikan. Tahap kedua adalah kritik sumber yang mencakup verifikasi terhadap keabsahan informasi dalam literatur serta penilaian kredibilitas terhadap hasil alih aksara maupun interpretasi para ahli terdahulu. Proses selanjutnya dilakukan melalui tahap interpretasi, di mana peneliti menganalisis makna di balik simbol religi Tantrayana dan kaitannya dengan strategi pertahanan kerajaan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Akhirnya, seluruh hasil analisis tersebut disatukan dalam tahap historiografi untuk menyajikan narasi sejarah yang sistematis, deskriptif, dan analitik mengenai kedaulatan Adityawarman di pedalaman Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak Peninggalan Arkeologis Masa Adityawarman di Minangkabau

Raja Adityawarman merupakan tokoh sentral yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Malayu dari wilayah Dharmasraya menuju pedalaman Minangkabau pada abad ke-14. Masa pemerintahan sang raja yang berlangsung antara tahun 1347 hingga 1375 Masehi dianggap sebagai periode puncak kejayaan politik dan keagamaan di wilayah tersebut (Kusumadewi, 2012). Ia menyatukan otoritas keduniawian dengan landasan spiritual Buddha Tantrayana sekte Bhairawa guna memperkuat legitimasi kekuasaannya. Perpindahan ibu kota ke wilayah pegunungan ini memberikan perlindungan strategis serta akses langsung terhadap sumber daya emas yang sangat melimpah (Alian, 2013). Penggunaan simbol keagamaan membantu memperkuat posisi politik Adityawarman di Minangkabau. Prasasti dan arca menunjukkan hubungan erat antara simbol keagamaan dan kekuasaan politik pada masa Adityawarman (Setiawan et al., 2016).

Persebaran peninggalan sejarah masa ini menunjukkan jangkauan administratif yang sangat luas, mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Dharmasraya, Pasaman, hingga Saruaso (Africon et al., 2024). Penemuan delapan belas prasasti di wilayah Tanah Datar menjadi bukti otentik bahwa kawasan ini merupakan episentrum kegiatan politik dan keagamaan yang sangat dinamis. Situs Saruaso memegang peranan vital karena di lokasi inilah ditemukan maklumat resmi mengenai



pentahbisan raja serta pembangunan infrastruktur penting. Sementara itu, jejak arkeologis di wilayah Pasaman berupa reruntuhan bangunan bata menunjukkan adanya ekspansi kebudayaan hingga ke wilayah barat laut Sumatera Barat. Persebaran artefak yang sistematis ini membuktikan adanya keteraturan struktur birokrasi dan jaringan keagamaan yang mapan di bawah kepemimpinan sang penguasa (Istiawan, 2006).

Prasasti-prasasti peninggalan Adityawarman menampilkan kekayaan literasi melalui penggunaan kombinasi bahasa Sanskerta dan Melayu Kuno. Bahasa Sanskerta umumnya digunakan dalam bagian puji-pujian atau *rajapuja* untuk menegaskan status sakral raja dan entitas ketuhanan. Sebaliknya, bahasa Melayu Kuno diaplikasikan agar pesan-pesan resmi kerajaan dapat dipahami secara luas oleh masyarakat lokal di wilayah kedaulatannya (Istiawan, 2006). Penulisan prasasti tersebut menggunakan aksara pasca-Pallava atau Tulisan Sumatra Kuno yang telah mengalami evolusi estetika secara mandiri. Keberagaman linguistik ini mencerminkan interaksi budaya yang kompleks antara kaum elit keraton yang berpendidikan tinggi dengan masyarakat agraris di pedalaman (Kusumadewi, 2012).

Dokumentasi tertulis dalam Prasasti Pagaruyung I dan Prasasti Kuburajo I menguraikan strategi legitimasi politik melalui penyeteraan diri raja dengan entitas adikodrati. Prasasti Pagaruyung I memuja Adityawarman sebagai penjelmaan *Adibuddha* yang memiliki kebijaksanaan luhur dan kekuatan batin yang tak terhancurkan. Sementara itu, Prasasti Kuburajo I memosisikan sang penguasa sebagai titisan *Sri Lokesvara* atau *Avalokitesvara* yang bertugas melindungi seluruh makhluk hidup (Pratiwi et al., 2024). Raja juga menyandang gelar *Kanakamedinindra* atau penguasa tanah emas guna menegaskan kedaulatannya atas wilayah penghasil komoditas paling berharga di Nusantara. Konsep dewa-raja ini sengaja dibangun untuk menciptakan citra penguasa sakral yang memiliki kewibawaan spiritual mutlak di hadapan rakyat dan musuh politiknya (Kusumadewi, 2012).

Catatan ritual keagamaan yang paling ekstrem ditemukan dalam Prasasti Saruaso I yang menyebutkan tentang peristiwa pentahbisan raja. Melalui upacara penyucian yang sakral, Adityawarman resmi menyandang gelar spiritual sebagai *Ksetrajna* dengan nama penobatan *Wisesadharani*. Ritual tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan ketat sekte Bhairawa yang bertujuan untuk mencapai pelepasan spiritual tertinggi dalam waktu singkat (Istiawan, 2006). Konsep ini melibatkan meditasi mendalam yang diyakini memberikan kekuatan magis luar biasa bagi raja untuk memimpin negara di tengah ancaman luar. Penggunaan gelar spiritual ini menjadi bukti kuat betapa dominannya ajaran Tantrayana dalam mengarahkan visi religius dan kebijakan politik di lingkungan kerajaan (Pratiwi et al., 2024).

Selain aspek spiritualitas yang tinggi, peninggalan arkeologis seperti Prasasti Bandar Bapahat dan Prasasti Rambatan menunjukkan perhatian besar raja terhadap sektor publik. Prasasti Bandar Bapahat yang dipahatkan pada dinding saluran air mencatat pembangunan sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat (Pratiwi et al., 2024). Di sisi lain, Prasasti Rambatan menyebutkan pembangunan sebuah bangunan suci guna menghormati jejak kaki Buddha atau *Jinapada*. Bangunan pemujaan ini dilengkapi dengan atap pelindung yang pengerjaannya diawasi langsung oleh pejabat setingkat menteri (Istiawan, 2006). Keberadaan infrastruktur agraris dan religius ini membuktikan bahwa Adityawarman adalah penguasa yang sangat memperhatikan kemakmuran ekonomi masyarakat berbasis pertanian.



Arca Bhairawa yang ditemukan di situs Padang Roco merupakan peninggalan fisik paling monumental yang merepresentasikan ajaran Tantrayana. Patung raksasa setinggi 4,41 meter ini adalah perwujudan Raja Adityawarman sendiri dalam bentuk dewa yang memiliki karakter demonis (Pratiwi et al., 2024). Sosok arca digambarkan berdiri tegak dengan mata melotot dan taring yang tajam untuk memunculkan kesan magis yang menggentarkan. Penempatan arca berukuran kolosal ini di lokasi strategis berfungsi sebagai simbol perlindungan atau *dharmapala* bagi wilayah kerajaan. Ikonografi yang mengerikan tersebut sengaja dirancang guna membentengi kekuasaan kerajaan dari ancaman fisik maupun pengaruh eksternal yang tidak diinginkan (Mulyadi et al., 1993).

Simbolisme pada Arca Bhairawa mengandung makna filosofis yang sangat dalam terkait ritual pelepasan spiritual. Arca ini mengenakan atribut berupa untaian tengkorak manusia pada bagian pinggang dan memegang mangkuk tengkorak sebagai wadah persembahan. Tangan kanannya memegang sebuah pisau besar atau *sarpa* yang melambangkan kekuatan untuk memusnahkan segala bentuk rintangan spiritual (Mulyadi et al., 1993). Landasan arca yang dipenuhi pahatan mayat dan tulang belulang menunjukkan bahwa ritual dilakukan di halaman kuburan atau *ksetra*. Seluruh ornamen visual ini bertujuan untuk mengukuhkan wibawa karismatik sang penguasa agar mendapatkan ketaatan spiritual mutlak dari seluruh pengikut setianya (Pratiwi et al., 2024).

Temuan arkeologis pendukung lainnya berupa fragmen makara dan *dwarapala* di wilayah Rao semakin memperkuat bukti adanya infrastruktur peribadatan yang teratur. Makara berfungsi sebagai simbol pelindung gerbang candi yang melambangkan keharmonisan antara unsur penguasa daratan dan lautan (Setiawan et al., 2016). Arca *dwarapala* yang ditemukan di situs Padang Nunang menunjukkan fungsi sebagai penjaga area suci yang memiliki kemiripan dengan situs-situs di Padang Lawas. Ditemukan pula fragmen perunggu berbentuk Ganesha yang membuktikan tingginya penguasaan seni kriya logam pada periode pemerintahan tersebut. Keberadaan komponen arsitektur bangunan ini mengonfirmasi bahwa pengaruh Buddha Tantrayana telah menyebar secara sistematis hingga ke wilayah-wilayah perbatasan Minangkabau (Oetomo et al., 2007).

Keseluruhan peninggalan arkeologis masa Adityawarman menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan mengenai integrasi politik dan agama Buddha Tantrayana di Minangkabau abad ke-14. Prasasti dan arca yang ditemukan bukan sekadar artefak keagamaan, melainkan media propaganda yang efektif untuk mengukuhkan kedaulatan Kerajaan Malayu (Pratiwi et al., 2024). Jejak kebudayaan Bhairawa ini memberikan identitas sejarah yang unik dalam perjalanan panjang masyarakat Sumatera Barat sebelum masa transisi menuju Islam. Pelestarian terhadap situs-situs sejarah ini sangat penting guna menjaga memori kolektif bangsa mengenai kejayaan peradaban Nusantara di masa lampau. Dengan demikian, warisan arkeologis Adityawarman tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu atas keagungan kepemimpinan dan spiritualitas di Ranah Minang (Africon et al., 2024)

Legitimasi Kekuasaan Raja Adityawarman melalui Buddha Tantrayana

Raja Adityawarman menggunakan ajaran Buddha Tantrayana sebagai instrumen politik yang sangat efektif untuk memperkuat fondasi kekuasaannya. Penggunaan ajaran ini bertujuan untuk menyatukan otoritas keduniawian dengan kekuatan spiritual yang sakral agar rakyat tunduk secara mutlak (Pratiwi et al., 2024). Sang raja memandang bahwa legitimasi keagamaan merupakan



kunci utama dalam menjaga stabilitas politik di Sumatera. Melalui landasan spiritual ini, ia berhasil mengonsolidasikan berbagai kekuatan lokal menjadi satu kesatuan administratif yang kokoh. Visi keagamaan yang kuat tersebut menjadikan kedudukan raja tidak hanya sebagai pemimpin militer namun juga pemandu spiritual. Seluruh peninggalan prasasti mencerminkan ambisi besar sang raja untuk menciptakan tatanan negara yang bersifat sakral (Alian, 2013).

Konsep dewaraja digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Adityawarman. Melalui konsep ini, raja dipandang sebagai titisan dewa yang bertugas menjaga keseimbangan antara jagat raya dan manusia (Kusumadewi, 2012). Penyetaraan diri dengan entitas ilahi tersebut berfungsi untuk memberikan keabsahan terhadap wewenang raja yang tidak terbatas. Rakyat meyakini bahwa perintah raja adalah kehendak dewa yang harus dihormati demi keselamatan bersama. Pengukuhan posisi sebagai dewa di dunia ini memberikan kharisma yang luar biasa bagi kepemimpinan sang penguasa. Konsep sakralitas raja memperkuat posisi politik penguasa di lingkungan kerajaan (Pratiwi et al., 2024).

Prasasti Pagaruyung I memberikan informasi mendalam mengenai penyetaraan diri Raja Adityawarman dengan sosok Adibuddha. Adibuddha merupakan entitas tertinggi dalam hierarki Buddhis yang dipandang sebagai sesuatu yang kekal dan abadi. Di dalam teks prasasti tersebut, sang raja dipuji sebagai pelindung kemiskinan yang memiliki tulus hati (Istiawan, 2006). Identifikasi diri dengan Adibuddha memberikan kesan bahwa raja adalah sumber dari segala pencerahan bagi rakyatnya. Penggunaan gelar tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperkuat legitimasi kekuasaan. Klaim sebagai sosok yang abadi ini bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti di wilayah pedalaman Minangkabau (Pratiwi et al., 2024).

Legitimasi politik sang penguasa semakin diperkuat melalui penyetaraan dirinya dengan *Bodhisattwa Avalokitesvara* dalam Prasasti Kuburajo I. *Avalokitesvara* merupakan simbol kasih sayang sempurna yang selalu bekerja tanpa lelah menolong makhluk hidup. Raja memposisikan dirinya sebagai sosok yang penuh pengorbanan dan murah hati kepada seluruh rakyat (Kusumadewi, 2012). Citra sebagai raja yang welas asih ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur publik yang bermanfaat. Penggambaran diri sebagai *Bodhisattwa* membuat kepemimpinan raja mendapatkan dukungan tulus dari masyarakat luas. Hubungan emosional antara rakyat dan penguasa menjadi lebih kuat karena raja dianggap sebagai pelindung suci (Pratiwi et al., 2024).

Peristiwa spiritual paling penting dalam perjalanan politik sang raja tercatat dalam Prasasti Saruaso I. Adityawarman secara resmi ditahbiskan menjadi sosok *Ksetrajna* yang memiliki kendali penuh atas bidang spiritual. Ia menyandang gelar spiritual *Wisesa Dharani* setelah melalui serangkaian ritual meditasi yang mendalam (Istiawan, 2006). Ritual ekstrem sekte Bhairawa ini dilakukan guna mencapai pelepasan spiritual tertinggi dalam waktu singkat. Pentahbisan ini disaksikan oleh para pendeta dan menteri sebagai bentuk pengesahan otoritas sakral. Melalui upacara ini, raja dianggap telah memperoleh kekuatan magis yang tak terkalahkan untuk memimpin negara (Mukaffa, 2017).

Penggunaan nama pengangkatan atau *namabhiseka* juga menjadi strategi krusial untuk melegitimasi posisi raja. Nama-nama tersebut menggabungkan unsur dewa pelindung dengan nama *wangsa* untuk menunjukkan garis keturunan sah. Dalam Prasasti Amoghapasa, ia menggunakan gelar *Udayadityawarman* yang melambangkan kekuatan matahari yang bersinar. Nama *Rajendra*



yang sering dilekatkan pada gelarnya menunjukkan posisinya sebagai pemimpin para raja (Kusumadewi, 2012). Penggunaan identitas dari Dinasti Mauli bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari seluruh faksi politik. Strategi penamaan ini sangat efektif dalam membangun wibawa personal raja di mata musuh politiknya (Pratiwi et al., 2024).

Pemanfaatan simbol-simbol religius seperti ornamen kepala kala pada prasasti berfungsi sebagai media perlindungan magis. Ornamen kepala kala yang bertaring tajam diletakkan di bagian atas prasasti sebagai simbol pengusir roh jahat. Sementara itu, simbol *vajra* atau halilintar melambangkan keteguhan iman dan kekuatan yang sulit dihancurkan (Setiawan et al., 2016). Keberadaan Arca Bhairawa setinggi 4,41 meter menjadi puncak dari personifikasi kekuatan sakral Adityawarman. Arca raksasa yang mengerikan tersebut sengaja dibuat untuk menggentarkan nyali pihak luar yang ingin menyerang. Ikonografi Bhairawa kemungkinan berfungsi sebagai simbol kekuatan dan perlindungan kerajaan (Pratiwi et al., 2024).

Legitimasi melalui Buddha Tantrayana ini juga dipicu oleh situasi geopolitik yang mengancam kedaulatan kerajaan. Raja perlu memperkuat benteng pertahanan spiritual guna menghadapi ekspansi militer dari luar. Selain itu, munculnya pengaruh agama baru di pesisir dianggap sebagai tantangan bagi dominasi agama Buddha (Alian, 2013). Adityawarman memosisikan dirinya sebagai Dharmapala atau pelindung dharma yang agresif guna membendung pengaruh tersebut. Kekuatan magis dari ajaran Tantra diyakini mampu melindungi wilayah pedalaman dari segala ancaman asing. Dengan demikian, ritual-ritual rahasia yang dilakukan memiliki dimensi politis sebagai tameng keamanan negara (Pratiwi et al., 2024).

Jejak peninggalan spiritual Adityawarman telah membentuk identitas sejarah yang unik di Minangkabau. Meskipun ajaran ini akhirnya menghilang, sisa kebudayaannya tetap diabadikan melalui prasasti yang berdiri kokoh. Delapan belas prasasti di Tanah Datar kini menjadi saksi bisu atas kejayaan peradaban masa lampau (Africon et al., 2024). Penggunaan agama sebagai alat legitimasi politik menunjukkan tingkat kecerdasan diplomasi yang sangat tinggi. Pelestarian artefak sejarah ini terus dilakukan pemerintah guna memberikan edukasi mengenai akar budaya bangsa. Kisah perjalanan sakral Adityawarman tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif masyarakat Minangkabau (Pratiwi et al., 2024).

Fungsi Buddha Tantrayana dalam Strategi Pertahanan Kerajaan Minangkabau

Pemerintahan Adityawarman (1347-1374 M) di pedalaman Minangkabau memadukan aspek spiritualitas dengan instrumen politik yang kuat. Raja memanfaatkan ajaran Buddha Tantrayana sebagai fondasi utama kekuasaan kerajaan (Sulistya, 1985). Penemuan delapan belas prasasti di Sumatra Barat membuktikan bahwa kebijakan politik dan religi ini terdokumentasi secara historis (Africon et al., 2024). Adityawarman secara cerdas mengonsolidasikan posisi geopolitiknya melalui penyetaraan diri dengan entitas adikodrati. Legitimasi ini diperkuat dengan penggunaan gelar kebesaran guna meningkatkan wibawa sang penguasa di tengah masyarakat. Melalui sinkretisme tersebut, otoritas raja mendapatkan mandat suci yang tidak terbantahkan (Pratiwi et al., 2024).

Upaya memperkuat kedaulatan ini secara visual diwujudkan melalui simbol keagamaan yang agresif sebagai *dharmapala* atau pelindung utama kedaulatan kerajaan. Arca Bhairawa berwujud *krodha* (penuh amarah) didesain untuk menimbulkan efek psikologis penolak bahaya bagi



musuh. Raja memosisikan dirinya sebagai sosok pelindung suci guna menjaga kesucian agama dan keamanan wilayah (Siregar, 2016). Legitimasi kekuasaan diperkuat melalui representasi demonis yang menempatkan raja setara dengan kekuatan dewa. Penggambaran arca dengan mata melotot dan hiasan tengkorak menegaskan adanya perlindungan gaib yang tak tertandingi. Visualisasi sakral ini memastikan bahwa pusat kekuasaan kerajaan terlindungi dari segala bentuk ancaman luar (Mulyadi et al., 1993).

Seiring dengan penguatan simbolis tersebut, strategi pertahanan fisik diwujudkan dengan memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah pedalaman Minangkabau yang lebih terlindung. Relokasi ke wilayah Saruaso bertujuan menghindari invasi armada asing serta menjaga stabilitas politik. Secara geografis, jajaran pegunungan Bukit Barisan memberikan benteng alami yang menyulitkan penetrasi militer luar (Oetomo et al., 2007). Pemindahan ini juga memfasilitasi kontrol kerajaan terhadap jalur perdagangan emas dan hasil hutan secara mandiri. Ketahanan logistik didukung oleh ketersediaan lahan subur di lembah pedalaman untuk menghadapi pengepungan jangka panjang. Sinkronisasi antara aspek ekonomi dan taktik defensif geografis menjadi kunci stabilitas kekuasaan Adityawarman (Kusumadewi, 2012).

Kewaspadaan terhadap ekspansi Majapahit memicu penguatan ketahanan di jantung wilayah kerajaan. Adityawarman menegaskan kemandirian politiknya melalui penggunaan gelar *maharajadhiraja* pada berbagai prasasti resmi. Penempatan arca Bhairawa raksasa di Padangroco berfungsi sebagai peringatan keras bagi kekuatan luar yang mendekat. Tinggalan budaya pada masa ini menunjukkan identitas politik unik yang tidak sepenuhnya tunduk pada pengaruh Jawa. Kebijakan luar negeri sang raja cenderung menjaga jarak aman guna meminimalisir intervensi pusat kekuasaan lain. Keyakinan religi Tantra memberikan kekuatan mental bagi penguasa dalam mempertahankan integritas teritorialnya (Utomo & Sudarman, 2018).

Selain ancaman politik, penyebaran Islam di Sumatra bagian utara dipandang sebagai tantangan ideologis serius terhadap eksistensi kerajaan Buddhis. Adityawarman merespons dinamika ajaran baru tersebut dengan memperdalam ritual Tantrayana yang bersifat esoteris (Nababan et al., 2025). Pemujaan terhadap Dewa Bhairawa difungsikan sebagai benteng spiritual guna mengimbangi pengaruh kekuatan eksternal. Upacara penyucian yang megah diselenggarakan secara rutin untuk memperkuat loyalitas rakyat terhadap tradisi kerajaan. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan identitas budaya yang resisten terhadap pengaruh ideologi asing. Melalui penguatan ritual, raja membangun benteng mental kolektif bagi seluruh penduduknya (Mulyadi et al., 1993).

Kekuatan spiritual ini semakin diperkokoh dengan adanya komunikasi simbolik yang mendalam antara penguasa dan rakyat memperkuat konsolidasi sosial di dalam kerajaan (Yunis, 2025). Adityawarman melaksanakan ritual di atas tumpukan jenazah (*ksetra*) demi mencapai tingkatan spiritualitas tertinggi. Pentahbisan sebagai *ksetrajna* melegitimasi raja sebagai pemegang kekuatan magis pelindung keseimbangan dunia (Mukaffa, 2017). Metode komunikasi simbolik ini terbukti efektif dalam menyatukan dukungan kolektif di bawah kepemimpinan sakral. Karisma spiritual yang terpancar dari praktik religi menjadi modal sosial utama dalam penggerakan potensi pertahanan. Mandat adikodrati tersebut memastikan ketaatan mutlak masyarakat terhadap setiap instruksi strategis raja (Yunis, 2025).



Artefak sejarah di berbagai situs Sumatra Barat merekam integrasi teknologi pertahanan dengan nilai-nilai lokal. Penemuan arkeologis tersebut memberikan data krusial mengenai interaksi kultural yang mendukung stabilitas kekuasaan kerajaan (Setiawan et al., 2016). Museum Adityawarman saat ini berperan vital sebagai pusat pelestarian dan sumber edukasi sejarah bangsa. Koleksi replika arca dan prasasti memungkinkan publik mempelajari strategi pertahanan masa lampau secara langsung. Pemanfaatan museum sebagai sumber belajar membantu pewarisan nilai kepemimpinan masa klasik ke generasi penerus. Dokumentasi fisik melalui penemuan artefak menjadi bukti nyata kecemerlangan taktik militer di masa sejarah (Putra & Basri, 2023).

Pelestarian warisan budaya melalui museum bertujuan menjaga identitas lokal tetap hidup di tengah arus globalisasi. Pameran kebudayaan secara aktif mempromosikan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan nilai sejarah nasional (Martasari et al., 2025). Peninggalan Kerajaan Pagaruyung mencerminkan kompleksitas sosial serta ketangguhan bangsa Indonesia di masa lalu. Pemahaman terhadap sejarah panjang ini sangat penting guna memetik pelajaran berharga mengenai kedaulatan. Kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian memastikan strategi masa lalu tetap menjadi inspirasi pembangunan karakter. Warisan sejarah tersebut masih memiliki nilai penting bagi kajian budaya Indonesia (Rahmawati et al., 2024).

Ajaran Buddha Tantrayana berfungsi sebagai sistem pertahanan holistik yang menyatu dengan strategi politik. Efektivitas integrasi ini terbukti dari stabilitas wilayah pedalaman Minangkabau selama beberapa dekade kepemimpinan (Kusumadewi, 2012). Prasasti dan arca demonis merupakan simbol kedaulatan yang melindungi kerajaan secara fisik maupun spiritual. Hubungan antara agama dan politik membantu kerajaan mempertahankan kekuasaannya. Menjaga warisan sejarah Pagaruyung berarti memperkuat khazanah identitas budaya Nusantara bagi masa depan. Kesuksesan Adityawarman dalam mempertahankan wilayahnya menjadi preseden penting mengenai ketahanan berbasis nilai lokal (Africon et al., 2024).

KESIMPULAN

Penemuan arkeologis dari era Adityawarman mencerminkan kemajuan politik dan spiritual yang signifikan di Minangkabau pada abad ke-14. Berbagai prasasti telah ditemukan di daerah Tanah Datar, Saruaso, dan Dharmasraya. Prasasti-prasasti ini mengandung informasi mengenai kekuasaan, agama, serta kehidupan masyarakat pada zaman tersebut. Selain prasasti, juga ditemukan Arca Bhairawa yang menjadi simbol penting dalam pemerintahan Adityawarman. Semua peninggalan ini menjadi bukti yang kuat tentang pertumbuhan pengaruh Buddha Tantrayana di Minangkabau.

Adityawarman memanfaatkan Buddha Tantrayana sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Sang raja memperlihatkan dirinya sebagai penguasa dengan posisi spiritual yang tinggi melalui konsep dewaraja. Hal ini tampak dari penggunaan gelar-gelar keagamaan dalam sejumlah prasasti kerajaan. Ritual penobatan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan citra sakral sang raja di mata publik. Dengan demikian, kekuasaan raja mendapatkan dukungan yang bersifat religius dan politis sekaligus.

Ajaran Buddha Tantrayana juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan pertahanan kerajaan di daerah pedalaman Minangkabau. Penggunaan simbol Bhairawa menunjukkan adanya elemen perlindungan terhadap wilayah kekuasaan kerajaan. Pemindahan pusat pemerintahan ke



area pedalaman dilakukan untuk meningkatkan keamanan politik kerajaan. Ritual dan simbol keagamaan berperan dalam membangun kesetiaan masyarakat kepada penguasa. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara agama dan politik pada masa Adityawarman.

DAFTAR PUSTAKA

- Africon, J., Sayuti, M., & Usman, R. (2024). Perancangan Buku Ilustrasi Sejarah Delapan Belas Prasasti Adityawarman. *Jurnal Desain Komunikasi Kreatif*, 6(2), 250–258. <https://doi.org/10.35134/judikatif.v4i2.1>
- Alian. (2013). Pertumbuhan Kerajaan Melayu Sampai Masa Adityawarman. In *Repository Unsri*.
- Istiawan, B. (2006). *Selintas Prasasti dari Melayu Kuno* (pp. 19–22).
- Kusumadewi, S. A. (2012). *Ādityawarman (1347-1374 Masehi): Kajian Epigrafi*. Universitas Indonesia.
- Martasari, T., Sawitri, S. P., Saputri, F., & Syafrini, D. (2025). Pelestarian Warisan Budaya Masyarakat Minangkabau Melalui Museum Adityawarman Kota Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.2>
- Mukaffa, Z. (2017). Sunan Ampel dan Nilai Etis Islam Nusantara: Dari Tantra-Bhairawa kepada Praktik Keagamaan Nir-Kekerasan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 7(2), 432–468. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2017.7.2.432-468>
- Mulyadi, S., Yondri, L., Mutia, R., & Esda, E. (1993). *Replika Arca Adityawarman Koleksi Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat* (U. Dhavida, Ed.). Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat.
- Nababan, R., Sibagariang, A., Lumbangaol, A., & Waruwu, L. (2025). Sejarah Penyebaran Agama Buddha di Nusantara: Dari Awal Kedatangan Hingga Masa Kini. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(04), 2745–2753.
- Oetomo, R. W., Soedewo, E., Wiradnyana, K., & Koestoro, L. P. (2007). Arkeologi di Bagian Baratlaut Provinsi Sumatera Barat. In *Berita Penelitian Arkeologi* (Number 18). Balai Arkeologi Medan.
- Pratiwi, E., Sunliensyar, H. H., & Adi, A. M. W. (2024). Legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber-sumber prasasti. *Berkala Arkeologi*, 44(2), 121–138.
- Putra, F. D., & Basri, W. (2023). Museum Adityawarman Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Indonesia. *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 42–58. <https://doi.org/10.23887/jjps.v11i1.59181>
- Rahmawati, N., Susanti, L. R., & Hudaidah. (2024). Warisan Kerajaan Pagaruyung: Studi Historis-Antropologis. *BANDA HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Studi Budaya*, 2(2), 40.
- Setiawan, T., Susilowati, N., Hidayati, D., & Soedewo, E. (2016). *Sumatera Barat: Catatan Sejarah dan Arkeologi*. Bina Media Perintis & Balai Arkeologi Sumatera Utara.
- Siregar, S. M. (2016). Jejak Tantrayana Di Situs Bumiayu. *Naditira Widya*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.24832/nw.v10i1.174>
- Sulistya, B. (1985). Pengaruh Tantrayana Di Kawasan Nusantara. *Berkala Arkeologi*, 6(2), 48–60. <https://doi.org/10.30883/jba.v6i2.443>
- Utomo, B. B., & Sudarman. (2018). Tinggalan Budaya... [Fragmen Minangkabau Kuno]. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 22(2), 84–88.
- Yunis, M. (2025). *Palangkahan Komunikasi Simbolik dalam Metode Prediksi Waktu Masyarakat Minangkabau*. Minangkabau Press.